

KRITERIA PENILAIAN
PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT SERTA UU PP TPPU OLEH BPR DAN BPRS

CAKUPAN	HASIL PENILAIAN				
	1,0 - 1,9	2,0 - 2,9	3,0 - 3,9	4,0 - 4,9	5,0
Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan pengorganisasian dan SDM sangat memadai.	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan pengorganisasian dan SDM memadai.	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan pengorganisasian dan SDM cukup memadai.	Penetapan kebijakan dan prosedur tertulis oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan pengorganisasian dan SDM kurang memadai.	Tidak terdapat pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris melalui penetapan kebijakan dan prosedur tertulis serta kebijakan organisasi.
	Pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris sangat efektif.	Pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris efektif.	Pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris cukup efektif.	Pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris kurang efektif.	Pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris tidak efektif.

Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU Tanggal 12 Mei 2011

CAKUPAN	HASIL PENILAIAN				
	1,0 - 1,9	2,0 - 2,9	3,0 - 3,9	4,0 - 4,9	5,0
Kebijakan dan prosedur	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT secara komprehensif dan sangat memadai serta telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT secara memadai dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris namun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki.	Kebijakan dan prosedur telah dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT namun masih kurang memadai dan belum disetujui oleh Dewan Komisaris	Kebijakan dan prosedur belum dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT.
	Kebijakan dan prosedur program APU dan PPT telah dilaksanakan sepenuhnya secara konsisten sesuai pedoman yang telah disusun.	Kebijakan dan prosedur program APU dan PPT telah dilaksanakan sepenuhnya, namun belum konsisten.	Kebijakan dan prosedur program APU dan PPT telah dilaksanakan, namun belum konsisten, dan masih terdapat kekurangan.	Kebijakan dan prosedur program APU dan PPT belum dilaksanakan sepenuhnya.	Kebijakan dan prosedur program APU dan PPT tidak dilaksanakan.
Pengendalian intern	Sistem dan prosedur pengendalian intern komprehensif.	Sistem dan prosedur pengendalian intern memadai.	Sistem dan prosedur pengendalian intern cukup memadai.	Sistem dan prosedur pengendalian intern kurang memadai.	Tidak terdapat sistem dan prosedur pengendalian Intern.
	Pelaksanaan pengendalian intern sangat efektif.	Pelaksanaan pengendalian intern efektif.	Pelaksanaan pengendalian intern cukup efektif.	Pelaksanaan pengendalian intern kurang efektif.	Tidak dilakukan pengendalian intern.

Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU Tanggal 12 Mei 2011

CAKUPAN	HASIL PENILAIAN				
	1,0 - 1,9	2,0 - 2,9	3,0 - 3,9	4,0 - 4,9	5,0
Sumber daya manusia dan pelatihan	Memiliki SDM yang sangat kompeten dan terlatih dengan jumlah yang memadai.	Memiliki SDM yang kompeten dan terlatih dengan jumlah yang memadai.	Memiliki SDM yang kompeten dan terlatih namun jumlahnya tidak memadai.	Memiliki SDM yang kurang kompeten dan kurang terlatih.	Memiliki SDM yang tidak kompeten dan tidak terlatih dengan jumlah yang tidak memadai.
	Memiliki program pelatihan yang komprehensif dan sangat efektif.	Memiliki program pelatihan yang komprehensif dan efektif.	Memiliki program pelatihan sederhana namun cukup efektif.	Memiliki program pelatihan sederhana dan kurang efektif.	Tidak memiliki program pelatihan.

Lampiran 1 dan Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

BANK INDONESIA,

S. BUDI ROCHADI
DEPUTI GUBERNUR